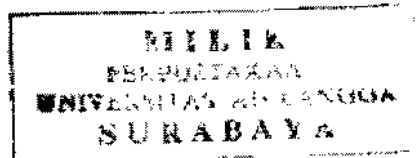


SKRIPSI

PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM SUATU STUDI KOMPARATIF



OLEH:

ARDHANA PRANASATRIA
NIM. 039710188 U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DAN
PENGADILAN NEGERI DALAM SUATU
STUDI KOMPARATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun

Dr. Afdol, S.H., M.S.
NIP. 130 517 143

Ardhana Pranasatria
NIM. 039710188 U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

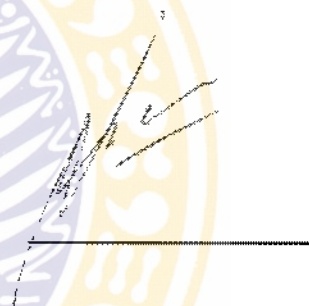
**Skripsi ini telah Diuji dan Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada Hari Senin, Tanggal 13 Desember 2004**

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Dr. AFDOL, S.H., M.S.



2. Drs. ABDUL SHOMAD, S.H., M.H.



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum proses perceraian di Pengadilan Agama menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Aturan hukum proses perceraian di Pengadilan Negeri menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

2. Dalam proses perceraian yang sederhana seperti keterangan yang terdapat pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama bagi umat Islam lebih sederhana daripada proses perceraian di Pengadilan Negeri bagi umat non Islam dikarenakan proses di Pengadilan Agama terjadi pada saat keputusan Hakim telah menjadi kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan di Pengadilan Negeri proses perceraian baru akan terjadi saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Dilihat dari tabel 3, 4 dan tabel 5, jumlah proses perceraian di Pengadilan Agama lebih cepat daripada proses perceraian di Pengadilan Negeri, dapat dilihat dari jumlah perceraian yang diputus setiap bulannya.

Mengenai biaya yang dikeluarkan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri dapat dikatakan relatif, tetapi bagi umat non Islam yang melakukan proses perceraian di Pengadilan Negeri masih harus mengeluarkan biaya lagi untuk mendapatkan akta cerai yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

4.2. Saran

1. Aturan hukum yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri telah cukup jelas, sehingga tidak perlu adanya perbaikan.
2. Melihat dari awal proses perceraian sampai dengan diterbitkannya akta cerai di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, untuk proses perceraian di Pengadilan Agama tidak ada aturan dan proses yang perlu dibenahi, tetapi untuk proses perceraian di Pengadilan Negeri masih banyak aturan dan proses peradilan yang harus dibenahi. Terutama tentang penerbitan akta cerai yang seyogyanya akta cerai umat non Islam tersebut diterbitkan di Pengadilan Negeri pula, sehingga umat non Islam tidak mengeluarkan biaya ekstra untuk akta cerai mereka dan untuk lebih menyederhanakan proses perceraian di Pengadilan Negeri.